

Vaksinasi Bagi Pelaku Pariwisata

BOYOLALI (KR) - Upaya pencegahan penyebaran virus korona dengan percepatan program vaksinasi terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Salah satunya seperti oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Boyolali, dengan menggelar vaksinasi massal untuk para pelaku usaha pariwisata pada Rabu (22/9) di aula kompleks perkantoran terpadu Alun-alun Lor Boyolali. Kepala Disporapar Kabupaten Boyolali Supana menjelaskan, target vaksinasi kali ini adalah pengelola objek pariwisata, pemandu lagu serta terapis pijat. "Semua yang ada di sektor wisata kita undang, kita pastikan semua sudah tervaksinasi pada hari ini," ujarnya. Dari target 400 orang yang akan mengikuti vaksinasi dosis pertama menggunakan Sinovac, hanya 165 yang hadir dikarenakan sebagian sudah divaksin di wilayah tempat tinggal masing-masing.

Supana mengatakan, vaksinasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi jika nanti Kabupaten Boyolali sudah memasuki Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level dua, maka obyek pariwisata sudah bisa dibuka. "Maka ketika kita buka, semuanya sudah dalam kondisi fit dan sudah tervaksinasi," katanya. Humas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Boyolali, Dwi Hidaroko mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Pemkab Boyolali atas teresenggaranya vaksinasi untuk para pelaku wisata di Kota Susu ini. **(M-2)**

Sedekah Korpri Salatiga Capai Rp 561 Juta

SALATIGA (KR) - Dana 'sedekah' anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Salatiga terkumpul Rp 561,150 juta yang sebagian dipotongkan dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) non guru. Bendahara Pengurus Korpri Salatiga, Bakti Harjanti dihubungi KR menjelaskan bahwa dana yang terkumpul berdasarkan imbauan Surat Edaran (SE) Sekda Salatiga tersebut Rp 561.150.000. Dana tersebut berasal dari 131 organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk sekolah, Bank Jateng, Perumda Bank Salatiga dan dari PDAM Salatiga.

"Jumlah keseluruhan dari dana bantuan khusus covid 19 dari anggota Korpri Salatiga Rp 561,150 juta. Sudah semuanya Mas. Uang itu masuk ke rekening sosial Korpri Salatiga di Perumda Bank Salatiga," tandas Bakti Harjanti, Rabu (22/9). Sedangkan pengeluaran yang telah diambillkan dari uang ini, terdiri dari membantu Komunitas Dapur Umum Darurat Salatiga dan Dapur Darurat Covid-19 MUMUCI di Jalan Monginsidi Salatiga Rp 10 juta. Kemudian bantuan operasional pengelolaan dan pendistribusian sembako bagi masyarakat melalui Sub Unit Korpri Setwan DPRD Salatiga sebesar Rp 5 juta, bantuan operasional relawan NU dalam pemulasaran dan persemayaman jenazah Covid-19 Rp 5 juta. Selain itu, juga memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) relawan NU senilai Rp 4,8 juta. **(Sus)**

Dusun Kembang Pilot Project Biopori

SALATIGA (KR) - Dusun Kembang, Kalurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Salatiga dijadikan pilot project pembuatan biopori (peresapan air) di Salatiga. Kegiatan ini diluncurkan bersamaan dengan memperingati Hari Palang Merah Indonesia (PMI) ke-76 di Salatiga. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Ketua PMI Salatiga sekaligus Wakil Walikota Salatiga Muh Haris mengatakan Dusun Kembang sebagai tuan rumah pembuatan biopori dalam rangka HUT ke-76 PMI.

Selain sebagai resapan air, biopori juga berfungsi sebagai peningkatkan daya resap air pada tanah untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Salatiga, Arif Suryadi mengatakan pihaknya melihat wilayah Kembang sebagai daerah tangkapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Salatiga. Karena itu, wilayah tersebut menjadi bagian konservasi Lingkungan Hidup, mengingat daerah-daerah bawah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari satu ekosistem lingkungan. **(Sus)**

Ritual Mendak Tirta di Lereng Merapi

BOYOLALI (KR) - Sejumlah warga Lereng Gunung Merapi di Dukuh Munggur, Desa Kembangsari, Kecamatan Musuk melakukan prosesi Mendak Tirta pada Rabu (22/9). Prosesi pengambilan air suci atau air kehidupan ini dilakukan di Kompleks Gua Maria desa setempat atau tepatnya di Sendang Mawar Tirta Wening Kalipodang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diungkapkan oleh salah satu Pengelola Sendang Mawar Tirta Wening Kalipodang, Sumarno bahwa Mendak Tirta tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan air kehidupan.

Sendang Mawar Tirta Wening Kalipodang tidak pernah habis meski di musim kemarau ini memiliki sembilan titik sumber mata air. "Kita meminta kepada Tuhan di situ ada sumber kehidupan dengan kita membasuh dan membawa untuk mengheningkan rasa tirta rasa kita. Setelah kita hening kita menghadap, menyembah (beribadah) kepada Tuhan," ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali, Darmanto menyambut baik acara ritual budaya tersebut. **(M-2)**



KR-Mulyawan

Prosesi Pengambilan Air Suci di Sendang Mawar Tirta Wening.

21 Tahun Berjuang, Petani Terima Redistribusi Tanah

SEMARANG (KR) - Setelah berjuang selama 21 tahun, para petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Penggarap Tanah Rakyat (P3TR) di Kabupaten Semarang, mendapatkan sertifikat redistribusi tanah seluas 198 hektare di lereng Gunung Ungaran. Sertipikat tersebut diserahkan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo disaksikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Demikian dikatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/9), usai serah terima sertipikat untuk petani secara virtual. Petani di lereng Gunung Ungaran tersebut sudah 21 tahun berjuang untuk memperoleh hak atas tanah tersebut.

Sutrisno, salah satu petani di lereng Gunung Ungaran sempat menceritakan

kepada Ganjar Pranowo terkait sejarah tanah tersebut. Bahkan ia menceritakan sangat runtut mulai sejak kependudukan Belanda dan Jepang di Indonesia sampai masa-masa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

"Tahun 1955 diterbitkan surat leter D untuk bayar pajak. Lalu sekitar tahun 1965 para petani dikumpulkan dan dilarang menginjakkan kaki di tanah itu karena di tempat itu akan dibuat latihan tanam sampai tahun 1969. Tahu-tahu tanah itu diakui oleh PT Sinar Kartasura," Sutrisno.

Selanjutnya sejak tahun 2000 P3TK memperjuangkan agar tanah tersebut didistribusikan. Perjuangan panjang itu akhirnya berhasil setelah ada program redistribusi tanah objek agraria. "Setelah mendapatkan ini, sertipikat akan disimpan dengan catatan, nanti ada

surat edaran kepada para petani, jangan sekali-kali tanah ini dijual," ungkapnya.

Ganjar Pranowo mengatakan, para petani di Kabupaten Semarang itu sudah puluhan tahun tidak mendapatkan haknya. Setelah ada redistribusi tanah objek agraria akhirnya akses dan hak petani kembali didapatkan.

"Saya kira reforma agraria redistribusi tanah ini bagian dari yang ditunggu. Masyarakat sangat menunggu, pasti mereka sangat senang sekali karena akhirnya mendapatkan kepastian dan mereka bisa menggarap untuk kesejahteraan mereka," tutur Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo mendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk memerangi mafia tanah. Menurutnya, saat ini masih banyak kejadian hak atas tanah seseorang hilang karena ada

kekuatan yang mengambil alih dengan cara apa pun. Bahkan tidak jarang juga mempengaruhi petugas dari BPN. "Komitmen Presiden tersebut sangat bagus. Bahkan presiden jelas menyampaikan, polisi tindak langsung mafia tanah," tegas Ganjar Pranowo.

Komitmen untuk memberantas mafia tanah itu,

membuat masyarakat tenang. Mereka yang memiliki sertipikat dan legalitas yang jelas terkait hak atas tanah dan kepemilikan tidak dapat digugat lagi. Itulah kepastian yang sudah disampaikan presiden. Gaanjar berharap mafia tanah semua berhitung apabila akan mengganggu hak atas tanah milik orang lain. **(Bdi)**



KR-Budiono

Ganjar Pranowo melakukan salam kekerabatan dengan salah seorang petani.

BUNTUT KLASTER COVID-19 DI SEKOLAH

PTM Dihentikan, Kesiapan Sekolah Dievaluasi

SEMARANG (KR) - Munculnya klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) harus disikapi serius oleh pemerintah daerah. Langkah yang mesti diambil adalah hentikan dulu PTM dan evaluasi kesiapan sekolah.

Demikian dikatakan anggota Komisi E DPRD Jateng dari Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto, Kamis (23/9) di Semarang. Menurut Yudi, tidak boleh ada egoisme sektoral di masa pandemi Covid-19. Lantaran satu sektor akan berkaitan dengan sektor lainnya. "Pendidikan merupakan hal yang penting. Tapi di saat pandemi seperti ini, perhatikan sektor kesehatan dan ekonomi. Itu juga urgen," tutur Yudi.

Sebagaimana diketahui kasus Covid-19 ditemukan di sejumlah

sekolah di Jateng. Mulai dari Jepara, Blora, Kota Semarang dan di Purbalingga. Sejak sebelum PTM dijalankan, Yudi mengaku sudah mengingatkan dinas pendidikan agar tak sembrono dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Saya sarankan untuk sementara setop dulu PTM, lantas lakukan evaluasi terhadap kesiapan sekolah. Kalau memang terjadi klaster besar maka PTM di wilayah tersebut hendaknya dihentikan dulu semuanya," tutur Yudi yang juga selaku Wakil Ketua

DPD Partai Gerindra Jateng.

Jika PTM dihentikan, siswa akan kembali belajar secara online. Untuk itu, guru atau tenaga pendidik mesti meningkatkan kemampuan guna memberikan materi dengan kreatif. Yudi khawatir jika kasus Covid-19 di Jateng yang sudah mulai landai justru akan terpicu naik kembali dengan PTM di sekolah yang belum siap.

Menurutnya, sekolah yang melaksanakan PTM mesti lebih diperketat. Persoalan vaksinasi adalah wajib bagi siswa yang telah memenuhi ketentuan, termasuk guru maupun keluarga para siswa. Itu harus menjadi syarat PTM. "Misalnya siswanya sudah di vaksin, guru sudah, tetapi kalau orang tuanya atau keluarga siswa yang tinggal serumah be-

lum divaksin, kan ya sama saja membahayakan. Hal seperti inilah yang mesti juga dipikirkan," Yudi.

Apalagi saat ini tingkat vaksinasi di Jateng masih tergolong rendah dan juga belum merata. Untuk itu Komisi E DPRD Jateng terus mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Yudi juga minta kepada Satgas covid untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan dengan ketat terutama di pusat-pusat keramaian. Kalau perlu bisa dipasang CCTV di tempat tempat yang memang rawan kerumunan. Langkah ini bisa untuk mengetahui seberapa patuh masyarakat akan protokol kesehatan. **(Bdi)**

Unimus dan Unnes Gelar Vaksinasi Merdeka

SEMARANG (KR) - Sebanyak 3.000 mahasiswa, pelajar dan warga masyarakat sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) selama 2 hari, Rabu-Kamis (22-23/9) menerima vaksinasi pertama vaksin Covid-19 di aula Rumah Sakit Gigi Mulut (RSGM) Unimus kawasan Kedungmundo.

Program 'Vaksinasi Merdeka' dibuka Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd merupakan sinergi Polri bersama mahasiswa, BEM, dan OKP yang dilaksanakan secara serentak

tak se-Indonesia selama dua hari.

Di Jateng-DIY ada 6 titik tempat vaksinasi yaitu Unimus, UPGRIS, Unnes (ketiganya di Semarang), di Kudus (UMK Kudus), Magelang (Untidar) dan Yogyakarta (Sekolah Tinggi Multi Media/STM-M).

Ketua Panitia Vaksinasi Merdeka Unimus drg Vilianti Eka Fitri Rahatina, Direktur RSGM drg Dwi Windu Kinanti A MMR, Presiden BEM Unimus Mudrik Rahma Prabawanto dan Koordinator Mahasiswa Mohamad

Farrel Arumki kepada pers di sela-sela pelaksanaan vaksinasi hari pertama, Rabu (22/9) menyampaikan ada sekitar 40 titik vaksinasi program 'Vaksin Merdeka' di seluruh Indonesia dan di tiap titik rata-rata bisa memvaksin sekitar 3.000 orang.

Sementara itu Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad Lutfi SH SST MK meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka tahap I (Sinovac) di Kampus Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, PJU Kodam IV Diponegoro, PJU Polda Jateng, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar SIK SH MHum, PJU Polrestabes Semarang, Wakil Rektor III Unnes Dr Abdurrahman MPd dan Wakil Presiden BEM Unnes Frans Collin. **(Sgi/Cry)**



KR-Sugeng Irianto

Suasana Vaksinasi Merdeka di Unimus.

Klaten Juara II Pemilihan LKD Provinsi

KLATEN (KR) - Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten kembali meraih penghargaan, sebagai Juara II Terbaik di ajang Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Tingkat Provinsi Jateng 2021. Keputusan pemenang kategori LKD Terbaik Jateng didasarkan surat pengumuman dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani langsung Sapta Hernawati selaku Pelaksana Tugas. Juara I disabet Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magelang dan Juara III diraih Kabupaten Banyumas. Juara Harapan I, II dan III masing-masing dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan dan Kota Surakarta. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Klaten Syahrana, Kamis (23/9) menjelaskan butuh kerja keras dari para arsiparis Klaten, untuk bisa meraih juara II tersebut. Hal ini disebabkan indikator penilaian yang cukup berat.

"Ada delapan indikator penilaian pemilihan LKD 2021 yang dilakukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Indikator itu meliputi Program kerja, Pengelolaan arsip dinamis, Penyusunan, Pengelolaan arsip statis, Sarpras kearsipan, SDM kearsipan, Pembinaan kearsipan, Inovasi bidang kearsipan dan profil kelembagaan," kata Syahrana. Terkait langkah khusus yang dilakukan untuk meraih juara II tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut, Syahrana mengatakan telah menggerakkan tim arsiparis untuk pendampingan dan pembinaan. Ada tiga langkah akselerasi yang dilakukan melalui para arsiparis. Langkah itu adalah pembinaan online kepada OPD karena pandemi. Lainnya, pelatihan secara webinar kerja bareng dengan ANRI Jakarta. **(Sit)**

Herd Immunity Warga Kota Magelang Tinggi

MAGELANG (KR) - Angka atau cakupan vaksinasi di Kota Magelang sudah mencapai sekitar 45 persen, yang semua merupakan warga Kota Magelang. Kalau secara sasaran, sudah sekitar 100 persen, hanya saja jumlah prosentase itu juga termasuk warga dari luar Kota Magelang. Hal itu dikemukakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Intan Suryahati kepada KR di Gedung Kuliah Umum dr H Suparsono Universitas Tidar (Untidar) dalam rangkaian kegiatan Vaksinasi Merdeka Serentak di 96 titik di Indonesia, Rabu (22/9).

Saat ini ada aturan baru berupa aglomerasi. Kota Magelang juga dipenga-

ruhi capaian vaksin di Kabupaten Magelang. Sasaran vaksinasi di Kabupaten Magelang banyak, dan sekarang baru sekitar 20 persen. Mengenai kasus Covid-19, dikatakan kejadiannya sudah menurun, warga juga sudah banyak herd immunity-nya. Saat ini kasusnya 1, kadang 0. Sebenarnya Kota Magelang sudah bersih. Kalau langsung diisolasi terpusat, sudah tidak menularkan lagi.

Hingga saat ini yang menjalani isolasi terpusat (isoter) masih ada beberapa orang. Kalau sebelumnya lokasi isoternya di Poltek Magelang dan Hotel Borobudur, saat ini hanya di 1 lokasi, yaitu di Hotel Borobudur karena yang

menjalani isoter tinggal sedikit, yaitu sekitar 8-9 orang. Angka Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di rumah sakit juga menurun, yaitu sekitar 21 orang. Dari jumlah ini, yang asli warga Kota Magelang hanya 3 orang lainnya dari luar Kota Magelang. Melihat hal ini sebenarnya Kota Magelang sudah masuk PPKM level 2.

Terpisah, Ketua BEM KM Untidar 2021 Ali Yasfi mengatakan dalam kegiatan vaksinasi ini BEM KM Untidar berkolaborasi dengan Polres Magelang Kota. Vaksinasi di Untidar sebanyak 3.000 dosis Sinovac, yang dibagi dalam 2 hari pelaksanaannya, yaitu Rabu dan Kamis (22-

23/9) masing-masing 1.500 dosis. Sasarannya mahasiswa dan masyarakat umum.

Informasi yang diperoleh dari Humas Untidar menyebutkan kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Indonesia Bangkit, Sinergitas BEM Selu-

ruh Indonesia (BEM SI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Mengangkat tajuk Vaksinasi Merdeka Serentak, kegiatan ini dilaksanakan di 96 titik di seluruh Indonesia. Salah satu titiknya adalah di Universitas Tidar. **(Tha)**



KR-Thoha

Kegiatan Vaksinasi Merdeka serentak berlangsung di aula Untidar Magelang.